

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:15) mengemukakan pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Walter T. Harrison dan Charles T. Horngren yang dialihbahasan oleh Gina Gania (2011:4) mengemukakan definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas perusahaan yang dapat menghasilkan informasi kepada pihak-pihak pengambil keputusan.

2.1.2 Akuntansi Keuangan

2.1.2.1 Definisi Akuntansi Keuangan

Menurut Keiso, dkk (2011:2) definisi akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun eksternal”.

Sedangkan menurut Dwi Martini, dkk (2012:8) menyatakan akuntansi keuangan sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses penyusunan laporan keuangan”.

Berdasarkan kedua definisi akuntansi keuangan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan merupakan proses pembuatan laporan keuangan oleh pihak penyusun laporan keuangan yang menyangkut perusahaan secara keseluruhan, untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:101) mendefinisikan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employess, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled* (Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan)”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:101) *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Menurut Adrian Sutedi (2012:1) *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Good corporate governance* yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (Gideon, 2005)

dalam Rahmawati (2012: 169) mendefinisikan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:37) mendefinisikan bahwa *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Good corporate governance* merupakan suatu *system* (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ektern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan meperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.3.2 Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* diharapkan dapat dijadikan titik acuan bagi para pemerintah dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:38-41) mengemukakan lima prinsip *good corporate governance*, yaitu:

- a. “Transparansi (*transparency*)
- b. Akuntabilitas (*accountability*)
- c. Responsibilitas (*responsibility*)
- d. Independensi (*independency*)
- e. Kesetaraan (*fairness*)”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan lima prinsip *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

- b. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

c. *Responsibilitas (responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pangkuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kesetaraan (fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG (Tjager dkk., 2003) dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2013:103). Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu:

- a. “Kewajaran (*fairness*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Pertanggungjawaban
- e. Kemandirian”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan lima prinsip corporate governance sebagai berikut:

a. Kewajaran (*fairness*)

Merupakan prinsip agar pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal ini yang memunculkan *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).

b. Transparansi

Artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.

d. Pertanggungjawaban

Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

e. Kemandirian

Artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.

Sebenarnya, tiga dari keempat prinsip GCG tersebut: transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab mempunyai arti yang sangat erat dan tumpang-tindih. Keempat prinsip ini merupakan jawaban langsung atas permasalahan/skandal yang dihadapi oleh dunia usaha, bukan hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia.

2.1.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki andil yang besar dan manfaat yang bisa membuat perubahan positif bagi perusahaan baik kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Penerapan *good corporate governance* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *change management* yang signifikan di perusahaan.

Manfaat *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.”
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden”.

Sedangkan menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* IICG (2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. “Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang

dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *good corporate governance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor.

2.1.3.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan manajerial, dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Tujuan dari *good corporate governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:34) adalah:

1. “Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan”.

Terdapat enam tujuan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yaitu:

1. “Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi”.

Jadi pada intinya, tujuan *good corporate governance* adalah penerapan sistem *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang sebagaimana melindungi para pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta manajemen dalam organisasi, kemudian peningkatan kualitas hubungan antara *stakeholders* dengan manajemen perusahaan.

2.1.3.5 Pengukuran *Good Corporate Governance*

Menurut Reny Dyah Retno & Denies Priantinah (2012) dalam penerapan *Good Corporate Governance* diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diterbitkan di majalah SWA.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Gabriela Cynthia Windah (2013) yang menyatakan bahwa:

“*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*)”.

Penelitian yang dilakukan oleh IICG untuk menilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yaitu setelah melakukan penilaian yang dilakukan dengan cara memberikan penilaian yang dilakukan dengan cara memberikan skor kepada perusahaan peserta, besaran nilai skor ini dibuat berdasarkan acuan yang telah dibuat IICG. Skor ini diambil hasilnya berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang diberikan ke perusahaan peserta. Adapun bobot nilai yang digunakan untuk menilai GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:

Tabel 2.1**Tahapan dan Bobot Nilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)**

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	<i>Self Assessment</i>	15
2.	Kelengkapan dokumen	20
3.	Penyusunan makalah dan presentasi	14
4.	Observasi ke perusahaan	51

Sumber : CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) (2011)

Menurut CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) (2011) penilaian proses riset dalam penentuan nilai penerapan *corporate governance* adalah sebagai berikut:

- a. “*Self Assessment*
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Makalah
- d. Observasi”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan penilaian proses riset dalam penentuan nilai penerapan *corporate governance* adalah sebagai berikut:

- a. *Self Assessment*

Pada tahap awal ini perusahaan harus mengisi *self assement* terkait penerapan CG (*Corporate Governance*) yang sudah di implementasikan dalam perusahaannya.

b. Kelengkapan dokumen

Pada tahap ini perusahaan harus membuat uraian penjelasan terkait penerapan CG (*Corporate Governace*) di perusahaan.

c. Makalah

Pada tahap ini perusahaan harus membuat uraian penjelasan terkait penerapan CG (*Corporate Governance*) di perusahaan yang dibentuk dalam makalah dengan meperhatikan sistematika yang telah ditentukan.

d. Observasi

Dalam tahap ini peneliti CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) akan datang langsung ke perusahaan untuk melihat secara pasti penerapan prinsip CG (*Corporate Governance*) di perusahaan.

Menurut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) (2011) bahwa nilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) akan dijadikan dasar acuan untuk menentukan perolehan peringkat berdasarkan skor yang telah ditentukan. Hasil peringkat CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) terbagi tiga kategori, yaitu cukup terpercaya, terpercaya dan sangat terpercaya. Ringkasan pemeringkat berdasarkan skor akan dijelaskan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2**Kategori Pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)**

Skor	Level Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya
70-84	Terpercaya
55-69	Cukup Terpercaya

Sumber : *Corporate Governance Perception Index (CGPI), 2011*

2.1.4 *Earning Power*

2.1.4.1 Pengertian *Earning Power*

Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan keuangan terlebih dahulu harus memahami kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan ini disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Disamping manajer keuangan (pihak intern perusahaan), beberapa pihak diluar perusahaan yang juga perlu memahami kondisi keuangan perusahaan adalah para (calon) pemodal, dan kreditur. Kepentingan keduanya mungkin berbeda namun tujuan sama yaitu untuk memperoleh informasi dari laporan keuangan. Calon pemodal (pembeli saham) akan lebih berkepentingan dengan prospek keuntungan (laba) perusahaan guna untuk mengetahui investasi yang akan mereka dapatkan di masa yang akan datang.

Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai suatu perusahaan adalah kemampuan memperoleh laba (*earnings power*). Menurut Bambang Riyanto (2008:37) pengertian *earning power* adalah sebagai berikut:

“*Earning power* adalah kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba.”

Menurut Agus Sartono (2008:125) mendefinisikan *earning power* adalah sebagai berikut:

“*Earning power* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan”.

Menurut Martono & D. Agus Harjito (2005:61) mendefinisikan *earning power* adalah sebagai berikut:

“*Earning power* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan *earning power* adalah kemampuan perusahaan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Earning Power*

Earning power memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:197) tujuan *earning power* bagi perusahaan maupun bagi pihak luar usaha adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, menurut Kasmir (2014:198) manfaat *earning power* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Dapat disimpulkan tujuan dan manfaat *earning power* adalah untuk mengetahui besarnya tingkat laba, posisi laba perusahaan tahun sebelumnya, perkembangan laba dari waktu ke waktu, besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

2.1.4.3 Pengukuran *Earning Power*

Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba (*earning power*). Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (*earning power*) menurut Bambang Riyanto (2008:43) menyatakan bahwa:

“Perhitungan *earnings power* atas dasar suatu sistem analisa yang dimaksudkan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Tinggi rendahnya *earning power* dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa dilihat dari rasio keuangan, yaitu dengan Profit Margin dan Persentase laba bersih dari nilai aktiva (ROA)”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan pengukuran *earning power* adalah sebagai berikut:

a. *Profit margin*

Dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan *sales*.

b. Persentase laba bersih dari nilai aktiva (ROA)

Dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan aktiva perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2008:123) *earning power* diukur dengan menggunakan:

Adapun rumus *return on total asset (ROA)*:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran *earning power* dengan profit margin dan ROA untuk mengetahui efesiensi perusahaan.

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan

manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Sedangkan menurut teori keagenan manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola). Hal ini terjadi karena manajer (pengelola) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan mempergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain antara lain: definisi manajemen laba yang diciptakan oleh *National Association of Fraud Examiners*, Fisher dan Resenzweig, Lewitt, serta Healy dan Wahlen dalam (Sri Sulistyanto, 2008).

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earning management is intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai

untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya”.

Menurut Fisher dan Rosenzweig dalam Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is a actions of a manager serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang)”.

Menurut Lewitt dalam Sri Sulistyanto (2008:50):

“Earnings management is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earnings occur when people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions (Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyertakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer)”.

Menurut Healy dan Wahlen dalam Sri Sulistyanto (2008:50):

“Earning management occurs when managers uses judgement in financial reporting and structuring transaction to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu)”.

Menurut Ahmed Riahai dan Belkaoui yang dialihbahaskan oleh Ali Akbar

Yolianto dan Risnawati Dermauli (2006:74) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba sebagai kemampuan untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan”.

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparini Harapan (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Menurut Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Earnings management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

2.1.5.2 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgment dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan”.

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetri informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan, tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

2.1.5.3 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2008:63):

1. “*Bonus Plan Hypothesis*
2. *Debt Covenant Hypothesis*

3. *Political Cost Hypothesis*”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Bonus Plan Hypotesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi dan cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.

3. *Political Cost Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-motede akuntansi yang dapat meperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Menurut Subramanyam, KR & Wild, Jhon J (2010:132) yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti mencatat ada tiga alasan yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Insentif Perjanjian
2. Dampak Harga Saham
3. Insentif Lain”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian

bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus lebih tinggi dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan. Manajer juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal.

3. Insentif Lain

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoli. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan asing.

2.1.5.4 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba yaitu:

- a. *“Taking a Bath*
- b. *Income Minimization*
- c. *Income Maximization*
- d. *Income Smoothing”*.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan beberapa pola dalam manajemen laba

sebagai berikut:

a. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat pengangkatan CEO baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

b. *Income Minimization.*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastic dapat diatasi dengan mengambil laba periode berikutnya.

c. *Income Maximization.*

Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. *Income Smoothing.*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

- a. “Penaikan laba (*income increasing*)
- b. Penurunan laba (*income decreasing*)
- c. Perataan laba (*income smoothing*)”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan pola manajemen laba sebagai berikut:

- a. Penaikkan laba (*income increasing*)

Pola penaikkan laba (*income increasing*), merupakan upaya perusahaan untuk mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan yang sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

- b. Penurunan laba (*income decreasing*)

Pola penurunan laba (*income decreasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

- c. Perataan laba (*income smoothing*)

Pola perataan laba (*income smoothing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya”.

Menurut Setiawati dan Na'im (2000) teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. “Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
2. Mengubah metode akuntansi
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan tiga teknik manajemen laba sebagai berikut:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.

Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perikraab terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya: mengubah metode

depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Contohnya: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai”.

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan Aurolla Saporini Harapan oleh (2010: 88) teknik atau tindakan manajemen laba meliputi:

1. “Mengubah metode depresiasi (misal dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus).
2. Mengubah umur harta – untuk menghitung depresiasi
3. Mengubah nilai sisa harta – untuk menghitung depresiasi
4. Menetapkan cadangan/ penyisihan piutang tak tertagih
5. Menetapkan cadangan/ penyisihan kewajiban warranty (jaminan)
6. Menentukan penilaian atas cadangan pajak tangguhan
7. Menentukan adanya kerusakan harta atau kerugian
8. Mengestimasi tahapan penyelesaian dari kontrak (dengan) metode persentase-penyelesaian
9. Mengestimasi realisasi atas klaim kontrak
10. Mengestimasi penghapusan atas investasi tertentu
11. Mengestimasi biaya restrukturisasi yang ditangguhkan
12. Mempertimbangkan perlunya dan jumlah persediaan yang dihapus
13. Mengestimasi kewajiban dampak lingkungan yang ditangguhkan
14. Membuat atau mengubah asumsi aktuarial pension

15. Menentukan besarnya harga transaksi pembelian (akuisisi) yang dialokasikan ke perolehan R&D dalam- proses
16. Menentukan atau mengubah umur amortisasi harta tak berwujud
17. Memutuskan umur kapitalisasi dari berbagai biaya seperti: pengembangan urukan tanah (*landfill*), advertensi tanggap langsung, dan pengembangan piranti lunak
18. Menentukan klasifikasi lindung nilai yang memadai untuk suatu derivative keuangan
19. Menetapkan apakah suatu investasi memperbolehkan tindakan mempengaruhi perusahaan *investee* (anak perusahaan)
20. Memutuskan apakah penurunan nilai pasar suatu investasi bukanlah temporer”.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
2. Mencatat pendapatan palsu.
3. Mengakui dan mencatat baiaya lebih cepat dan lambat.
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba sebagai berikut:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.

Upaya ini dilakuakn manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah

lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya.

2. Mencatat pendapatan palsu

Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapan pun.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Semakin kecil biaya ini membuat laba periode berjalan akan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan akan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban.

Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya.

Menurut Subramanyam, KR & Wild, Jhon J yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2010:131) terdapat tiga teknik manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Laba.
2. *Big Bath*.
3. Perataan Laba”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan tiga teknik manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Laba

Salah satu teknik manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

2. *Big Bath*

Teknik *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang

tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Teknik *big bath* juga seringkali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Perataan Laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan laba dan kemudian melaporkan laba ini pada saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba seperti ini.

2.1.5.5 Metode Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:216) model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Model Healy, Model De Angelo, Model Jones serta Model Jones dengan Modifikasi. Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode $t-1$

T = 1,2, T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan :

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t.

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus diatas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$ dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$NDTA_{it} = b_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[\frac{(\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{it})}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

b_0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

b_1, b_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = *Gross property, plant, and equipment* perusahaan i periode t

$\Delta TA_{i,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDA).

Discretionary accruals merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones Modifikasi

Model Jones dimodifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (D) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan

perubahan (D) utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$\text{Current Accruals} = D(\text{Current Assets} - \text{Cash}) - D(\text{Current Liabilities} - \text{Current Maturity of LongTerm Debt})$$

Langkah III: menghitung nilai nondiscretionary *accruals* sesuai dengan rumus diatas terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}}$ dan $\frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} = a_1 \left[\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + a_2 \left[\frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu a_1 dan a_2 yang akan dimasukkan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$\text{NDCA}_{it} = a_1 \left[\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + a_2 \left[\frac{(\Delta \text{Sales}_{i,t} - \Delta \text{TR}_{it})}{\text{TA}_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

NDCA_{it} = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

a_1 = *Estimated intercept* perusahaan *i* periode *t*

a_2 = *Slope* untuk perusahaan *i* periode *t*

$\text{TA}_{i,t-1}$ = *Total assets* untuk perusahaan *i* periode *t*

$\Delta\text{Sales}_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t

$\Delta\text{TR}_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t

Langkah IV: menghitung nilai *disrectionary current accruals*, yaitu *disrectionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DCA}_{it} = \frac{\text{CurrAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} - \text{NDCA}_{it}$$

Langkah V: Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana

terhadap $\frac{\text{TAC}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependennya serta $\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta\text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$, dan $\frac{\text{PPE}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}}$

sebagai variabel independennya.

$$\frac{\text{TAC}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} = b_0 \left[\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[\frac{\Delta\text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[\frac{\text{PPE}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$\text{NDTA}_{it} = b_0 \left[\frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[\frac{(\Delta\text{Sales}_{i,t} - \Delta\text{TR}_{it})}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[\frac{\text{PPE}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

b_0 = Estimated intercept perusahaan i periode t

b_1, b_2 = Slope untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Gross property, plant, and equipment perusahaan i periode t

$\Delta TA_{i,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t

Langkah VI: Menghitung nilai *disrectionary accruals*, *disrectionary long-term accruals*, dan *nondisrectionary long-term accruals*. *Disrectionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondisrectionary accruals* (NDTA). *Disrectionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *disrectionary accruals* (DTA) dengan *disrectionary current accruals* (DCA), sedangkan *nondisrectionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondisrectionary accruals* (NDTA) dengan *nondisrectionary current accruals* (NDCA).

2.1.5.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen (pengelola perusahaan). Hal ini terjadi karena pengelola (manajer) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan dipergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Manajemen laba sebagai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong terjadinya fenomena tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

Menurut Dul Muid (2009) faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Kepemilikan Insitutional
2. Proporsi Dewan Komisaris Indenpenden
3. Ukuran Dewan Komisaris
4. Keberadaan Komite Audit
5. Ukuran Perusahaan”.

Menurut Rice & Agustina (2012) faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “*Earning Power*
2. *Leverage*
3. Kepemilikan Institusional
4. Nilai Perusahaan”.

Sedangkan menurut Putu Putri Suriyani,dkk (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Kepemilikan Institusional
2. Dewan Komisaris
3. Persentase Saham Publik
4. Komite Audit
5. *Leverage*”.

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu: *Good Corporate Governance* dan *Earning Power*.

2.1.5.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba:

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hikmah Is'ada Rahmawati	"Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan"	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Dewan komisaris independen, Komite Audit Independen, dan Kepemilikan manajerial.	Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komite Audit Independen, dan Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Gea Rafdan Anggana & Andri Prastiwi (2013)	"Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Manajemen Laba (studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia)".	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Auditor Eksternal, dan Kepemilikan manajerial.	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Kualitas audit eksternal berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.
3.	Muh. Arief Ujiyantho & Bambang Agus Pramuka (2007)	"Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan".	Variabel Dependen: Manajemen Laba Kinerja Keuangan Variabel Independen: Kepemilikan	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative signifikan terhadap manajemen

			Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proposi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris.	laba. Proposi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Manajemen laba (<i>discretionary accruals</i>) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (<i>cash flow return on assets</i>).
3.	Umi Murtini & Rizal Mansyur (2012)	“Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Di Indonesia”.	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Komisaris	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>earnings management</i> . Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> . Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>earnings management</i> . Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>earnings management</i> .
4.	Budi S. Purnomo & Puji Pratiwi (2009)	“Pengaruh <i>Earning Power</i> Terhadap Manajemen Laba (<i>Earnings Management</i>)”	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: <i>Earning power</i>	<i>earning power</i> berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba cenderung lemah.
5.	Iman Santoso Chasan Doerjat (2009)	“Analisis <i>Earnings Power</i> Dampaknya Terhadap Praktik Manajemen Laba Studi Kasus Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk”.	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: <i>Earnings Power</i>	<i>Earnings power</i> memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.

Sumber: dari berbagai jurnal

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba

Good Corporate Governance merupakan pedoman dalam tata kelola yang baik, yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Dalam pelaksanaan penerapan *good corporate governance* ini dituangkan dalam suatu mekanisme kerja, salah satunya yaitu mekanisme internal perusahaan.

Teori penghubung *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba menurut Sri Sulistyanto (2008:154) adalah sebagai berikut:

“Salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk mengeliminirkan manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya”.

Corporate governance merupakan upaya untuk mengeleminasi manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha menurut Sulistyanto (2008:154) salah satu kunci utama keberhasilan *Good Corporate Governance* adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sebuah perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhan pribadi serta mendorong terciptanya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.

2.2.2 Pengaruh *Earning Power* Terhadap Manajemen Laba

Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (*earning power*). Menurut Bambang Riyanto (2008:37) “*earning power* adalah kemampuan untuk mengetahui efisiensi dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba”. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan, selain manajer sebagai pihak intern beberapa pihak diluar perusahaan yang perlu memahami kondisi keuangan perusahaan adalah para (calon) pemodal dan kreditur. *Earning power* sering digunakan oleh para investor dalam menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan besar kecilnya laba perusahaan, hal itu menjadikan motivasi kepada pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba yang dapat memberikan keuntungan kepada pribadi dan juga nilai pasar perusahaan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1

“Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earning power* perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang (*dysfunctional behavior*), yang salah satu bentuknya adalah *earnings management*”.

Selain itu menurut Stice, Stice & Skousen yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar (2009:419) mengemukakan bahwa:

“Laba bersih yang dilaporkan merupakan angka yang memperoleh perhatian paling banyak, maka angka ini pulalah yang paling mungkin dimanipulasi oleh para manajer, alasan tersebut benar-benar mencerminkan kekuatan yang seringkali bisa dikatakan sebagai pendorong para manajer untuk memanipulasi laba yang dilaporkan”.

Selain pernyataan-pernyataan diatas, juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008), mengemukakan adanya pengaruh *earning power* terhadap praktik manajemen laba bahwa:

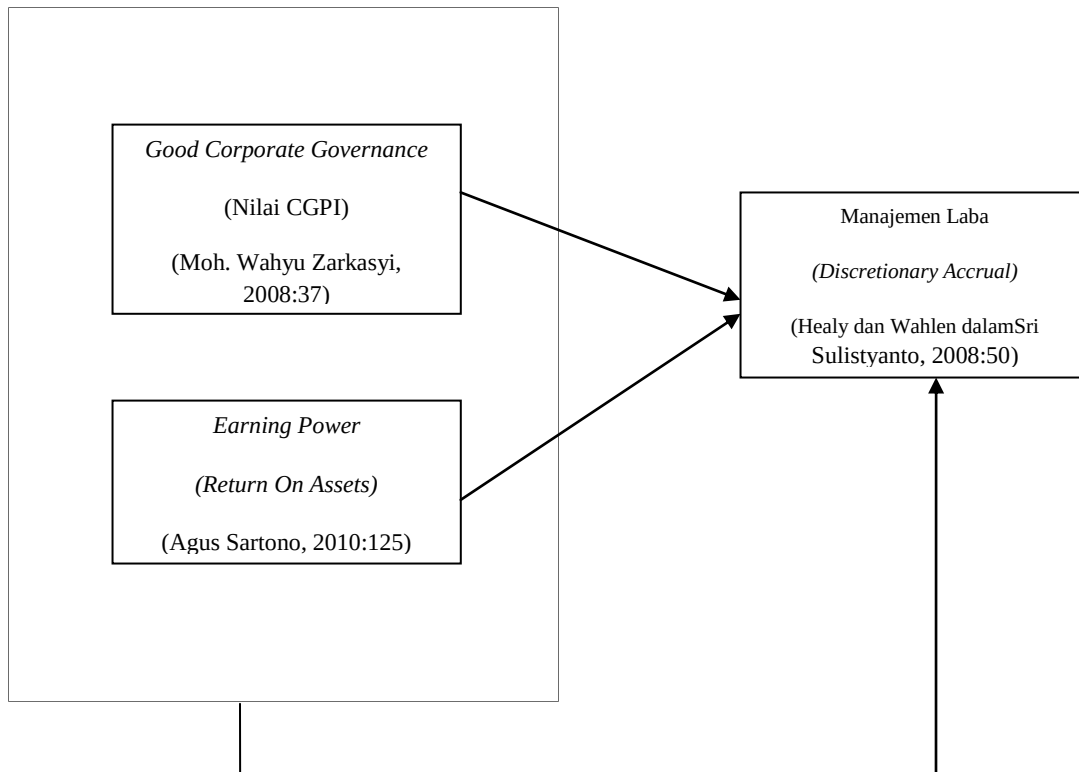
“*Earning power* perusahaan dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba baik dengan cara menerapkan kebijakan *income increasing accrual* ataupun *income decreasing accrual*. Hal ini tergantung dari motivasi masing-masing perusahaan. Meskipun demikian pengaruh tersebut cenderung lemah”.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan Iman Santoso (2009), mengemukakan adanya pengaruh manajemen laba bahwa:

“Apabila terjadi kenaikan pada *earning power* perusahaan maka akan diikuti dengan kenaikan nilai DAC (*Discretionary Accrual*) praktik manajemen laba, begitu juga sebaliknya jika penurunan *earning power* akan terjadi penurunan DAC pula”.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, karena seringkali dijadikan oleh pihak intern (manajer) dalam melakukan praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat bagan paradigma penelitian, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah proporsi, kondisi atau prinsip yang dianggap benar dan berangkat tanpa keyakinan, agar dapat ditarik suatu konsekuensi yang logis dan dengan cara ini kemudian digunakan pengujian tentang kebenaran dengan menggunakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi manajemen laba, yaitu: *Good Corporate Governance* dan *Earning Power*.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba.
2. Terdapat pengaruh *Earning Power* terhadap Manajemen Laba.
3. Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Earning Power* terhadap Manajemen Laba.